BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Laporan Kuliah Kerja Lapangan

Musyawarah merupakan titik pusat interaksi antara perencanaan dan perumusan, musyawarah berawal dari Kultur lisan, kemampuan menulis tangan, sampai dengan pemanfaatan komputer. Alat-alat komunikasi tersebut, ditunjang dengan Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkompeten, baik dalam hal pembuatan program maupun pengaplikasian program tersebut.

Musyawarah dapat memelihara dan menggerakkan dinamika kehidupan dan peradaban umat manusia. Pikiran dan perasaan adalah bentuk dari komunikasi seseorang atau banyak orang. Musyawarah juga dapat mengubah insting menjadi inspirasi dan tempat menyimpan ide bersama, memperkuat perasaan kebersamaan, serta mengubah pikiran menjadi perbuatan.

Musyawarah mencakup berbagai aspek dan unsur-unsur interaksi individu. Hal ini, dapat dijelaskan bahwa abstraksi historis komunikasi memberikan suatu perspektif bahwa pengekangan proses Musyawarah tercermin dari sikap perilaku penguasa, yaitu pemerintah. Pemerintah merupakan pranata yang mengatur aktivitas masyarakat. pranata tersebut terdiri dari lembaga-lembaga pemerintah negara atau daerah, dan untuk

This document was created using SOLID CONVERTER PDF To remove this message, purchase the product at www.SolidDocuments.com

melaksanakan aktivitas tersebut pada intinya dilakukan oleh pejabat dan pegawai pemerintah.

Pemerintahan memiliki hierarkhi wewenang dan garis panduan formal dan informal yang harus dipatuhi oleh pegawai-pegawainya. Hal ini, karena musyawarah menjalankan fungsinya sebagai kontrol yang bertujuan untuk perumusan atau perencanaan. Munculnya musrenbang untuk arah pembangunan pemerintah yang memiliki karakteristik sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya sebagai pengayom masyarakat sekaligus sebagai motivator, mediator, dan fasilitator pelaksanaan otonomi daerah.

Musrenbang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan yang didasarkan pada kondisi, potensi, permasalahan, kebutuhan nyata, dan aspirasi masyarakat yang tumbuh berkembang di Kabupaten Purwakarta. Pemerintah daerah kabupaten/kota memerlukan ketersediaan informasi mengenai data-data yang berhubungan dengan kualifikasi dan potensi daerah secara tepat dan akurat. Informasi yang tersedia harus diikuti dengan kemampuan aparatur pemerintah.

Pelaksanaan Musrenbang secara arif dan bijaksana untuk berbagai kepentingan pembangunan. Selain itu, berguna untuk memberikan manfaat dan memecahkan masalah-masalah lokal spesifik yang sedang dihadapi. Pemetaan secara akurat dari setiap informasi dapat memberikan jalan keluar terbaik dari setiap persoalan yang ada

This document was created using SOLID CONVERTER PDF To remove this message, purchase the product at www.SolidDocuments.com

melalui penerapan yang sesuai dalam mekanisme perencanaan pembangunan.

Pemerintah Daerah diharapkan segera melaksanakan proses pembangunan yang khususnya di Bidang Sosial dan Budaya Kabupaten Purwakarta, Pemanfaatan dapat dioptimalisasikan dengan kemajuan pembangunan di berbagai bidang untuk mengeliminasi sekat-sekat organisasi birokrasi, serta membentuk jaringan sistem manajemen dan proses kerja. Hal ini, memungkinkan instansi-instansi pemerintah bekerja secara terpadu untuk mencukupi kepentingan pembangunan yang disediakan oleh pemerintah.

Sejalan dengan itu pengembangan sumber daya manusia di bidang kebudayaan perlu mempunyai pemahaman yang sama dalam melaksanakan pembangunan kebudayaan. Selanjutnya disadari bahwa Indonesia memiliki banyak peninggalan sejarah, purbakala dan kesenian yang sangat berharga, sehingga pengelolaan aset budaya ini tidak saja penting untuk dapat dimanfaatkan sebagai aset yang dapat menghasilkan devisa (sebagai aset wisata) namun juga merupakan aset yang dapat menjadi wahana untuk mempelajari peradaban manusia di dunia. Berkaitan dengan hal itu, disadari bahwa aset budaya tersebut juga banyak yang belum dilindungi oleh *property rights* yang di era modern ini sudah menjadi norma yang berlaku di dunia. Pengakuan atas hak kepemilikan ini menjadi penting karena perkembangan budaya dan pergaulan dunia yang mengarah ke proses global membutuhkan

This document was created using SOLID CONVERTER PDF To remove this message, purchase the product at www.SolidDocuments.com

kejelasan atas pemanfaatan segala aset budaya berkaitan dengan kepemilikan, pengumpulan, dan imbalan pemanfaatannya. Kepemilikan aset budaya yang unik dan hanya dimiliki oleh bangsa Indonesia perlu ditata dan diproses juga agar tidak menjadi masalah di kemudian hari.

Salah satu melihat permasalahan pembangunan sosial dan budaya adalah masih rendahnya kedudukan dan peranan perempuan di sebagian besar bidang kehidupan dan pembangunan yang mengakibatkan ketimpangan *gender*. Ketimpangan gender ini diperburuk dengan masih banyaknya kebijakan dan program pembangunan, serta hukum dan peraturan perundang-undangan yang belum tanggapan, sehingga perempuan yang paling banyak menanggung berbagai bentuk ketidaksetaraan dan ketidakadilan, seperti tingginya angka buta huruf dan kematian ibu melahirkan, lemahnya sistem perlindungan tenaga kerja terutama tenaga kerja perempuan yang bekerja di luar negeri dan di sektor informal, serta tindak kekerasan dan perdagangan perempuan dan anak.

Dalam rangka mengatasi permasalahan pembangunan seperti tersebut di atas, berbagai upaya pembangunan bidang sosial dan budaya yang akan dilaksanakan pada tahun 2010 meliputi: pembangunan kesehatan dan kesejahteraan sosial, termasuk kependudukan, pemberdayaan keluarga dan keluarga berencana; kebudayaan dan kesenian; kedudukan dan peranan perempuan.

This document was created using SOLID CONVERTER PDF To remove this message, purchase the product at www.SolidDocuments.com

Perencanaan memegang peranan yang cukup penting dalam pelaksanaan pembangunan. Penetapan perencanaan yang partisipatif, terintegrasi, menyeluruh dan akuntabel diyakini mampu menghasilkan *output* pembangunan yang optimal. Perencanaan memiliki arti yang sangat luas serta dimensi yang saling melengkapi satu sama lain. Dalam konteks akademis, terutama dalam prinsip-prinsip manajemen pada umumnya menempatkan perencanaan pada tahapan awal dari proses manajerial suatu organisasi. Pentingnya perencanaan dan peran yang dimainkannya di dalam keseluruhan proses manajerial, menempatkan perencanaan sebagai faktor penentu keberhasilan pencapaian tujuan-tujuan pembangunan.

Penyelenggaraan Urusan Perencanaan Pembangunan (PUPP) pada tahun 2007 diarahkan guna mewujudkan terciptanya dokumen perencanaan yang disusun secara partisipatif dan demokratis, melalui pelibatan berbagai *stakeholders* pembangunan daerah serta koordinasi perencanaan dan pengendalian pembangunan. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Purwakarta, sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang mempunyai tugas pokok dan fungsi menyelenggarakan perencanaan pembangunan di daerah, pada tahun 2007 telah menghasilkan beberapa dokumen dan pelaksanaan perencanaan pembangunan.

Guna lebih menyelaraskan rencana pembangunan tahunan daerah serta dalam rangka eksplorasi aspirasi masyarakat, pada awal Januari

This document was created using SOLID CONVERTER PDF To remove this message, purchase the product at www.SolidDocuments.com

sampai dengan Maret Tahun 2007 telah dilaksanakan Musrenbang (Musyawarah Perencanaan Pembangunan), yang meliputi kegiatan: Musrenbang Tingkat Desa dan Kelurahan, Musrenbang Tingkat Kecamatan, Forum SKPD dan Musrenbang Tingkat Kabupaten. *Output* dari pelaksanaan Musrenbang Tahun 2007 berupa Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Purwakarta Tahun 2008.

Aspek akuntabilitas pembangunan, pada tahun 2007 telah dilaksanakan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2006 dan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Purwakarta Tahun 2006. Melihat dari dokumen tersebut merupakan *report* pertanggungjawaban pengelolaan pembangunan serta perkembangan kinerja pembangunan selama tahun anggaran 2006.

Masalah pembangunan Bidang Sosial di Kabupaten Puwakarta, lebih banyak didominasi oleh lamanya proses rekapitulasi data dan sering membuat data tidak dapat dipergunakan sesegera mungkin untuk berbagai keperluan. Kendala di atas juga dialami oleh Kabupaten Purwakarta dalam Bappeda. Berdasarkan permasalahan yang muncul dalam pelaksanaan Musrenbang pemerintahan melalui Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) di Kabupaten Purwakarta tersebut, maka penulis mengambil judul Laporan Kuliah Kerja Lapangan **"PELAKSANAAN MUSRENBANG DALAM BIDANG SOSIAL**

This document was created using SOLID CONVERTER PDF To remove this message, purchase the product at www.SolidDocuments.com

DAN BUDAYA DI BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH (BAPPEDA) KABUPATEN PURWAKARTA".

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka untuk mempermudah arah dan proses pembahasan, penulis mengidentifikasikan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana cara memecahkan masalah Musrenbang dalam Bidang Sosial dan Budaya di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Purwakarta?
2. Bagaimana kendala yang ada dalam Musrenbang Terhadap Bidang Sosial dan Budaya di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Purwakarta?
3. Bagaimana ancaman yang timbul dalam Musrenbang Terhadap Bidang Sosial dan Budaya di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Purwakarta?

1.3 Maksud dan Tujuan Laporan Kuliah Kerja Lapangan

Maksud Kuliah Kerja Lapangan ini adalah untuk mengetahui Pelaksanaan Musrenbang dalam Bidang Sosial dan Budaya di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) di Kabupaten Purwakarta Adapun tujuannya adalah:

This document was created using SOLID CONVERTER PDF To remove this message, purchase the product at www.SolidDocuments.com

1. Untuk mengetahui cara memecahkan masalah Sosial dan Budaya dalam Musrenbang di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Purwakarta.
2. Untuk mengetahui kendala Musrenbang dalam Bidang Sosial dan Budaya di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Purwakarta.
3. Untuk mengetahui ancaman yang timbul dalam Musrenbang dalam Bidang Sosial dan Budaya di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Purwakarta.

1.4 Kegunaan Laporan Kuliah Kerja Lapangan

Kegunaan Laporan Kuliah Kerja Lapangan ini diantaranya:

1. Untuk Kepentingan Penulis

   Mengembangkan teori yang telah diperoleh di bangku kuliah dengan praktek di lapangan mengenai pelaksanaan Musrenbang dalam Bidang Sosial dan Budaya di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) di Kabupaten Purwakarta.

2. Untuk Kepentingan Ilmu (Guna Ilmiah)

   Penulisan ini berguna untuk mengembangkan wawasan dan pemahaman tentang Ilmu Pemerintahan Mengenai Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) dalam Bidang Sosial dan Budaya di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) di Kabupaten Purwakarta.

This document was created using SOLID CONVERTER PDF To remove this message, purchase the product at www.SolidDocuments.com

3. Untuk Kepentingan Praktis

   Memberikan masukan kepada Pemerintah Kabupaten Purwakarta dan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Purwakarta mengenai Pelaksanaan Musrenbang dalam Bidang Sosial dan Budaya di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) di Kabupaten Purwakarta.

1.5 Kerangka Pemikiran Laporan Kuliah Kerja Lapangan

Pengungkapan teori ini dibuat sesuai dengan pedoman dalam menganalisa masalah yang diteliti. Menurut Solichin Abdul Wahab dalam bukunya yang berjudul *Analisis Kebijakan Dari Formulasi ke Implementasi Kebijaksanaan Negara* mengemukakan pendapatnya mengenai Pelaksanaan atau implementasi sebagai berikut:

> "Implementasi adalah tindakan-tindakan yang dilakukan oleh individu atau pejabat-pejabat, kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada terciptanya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan".(Wahab, 2001:65).

Berdasarkan pengertian implementasi yang dikemukakan di atas, dapat dikatakan bahwa implementasi adalah tindakan-tindakan yang dilakukan oleh pihak-pihak yang berwenang/berkepentingan baik pemerintah maupun swasta yang bertujuan untuk mewujudkan cita-cita/tujuan yang telah ditetapkan. Implementasi berkaitan dengan berbagai tindakan yang dilakukan untuk melaksanakan/merealisasikan program yang telah disusun demi tercapainya tujuan dari program yang telah

This document was created using SOLID CONVERTER PDF To remove this message, purchase the product at www.SolidDocuments.com

direncanakan, karena pada dasarnya setiap rencana yang ditetapkan memiliki tujuan atau target yang hendak dicapai.

Musyawarah antarmanusia hanya dapat terjadi, apabila ada seseorang yang menyampaikan pesan kepada orang lain dengan tujuan tertentu, artinya musyawarah hanya dapat terjadi apabila didukung oleh adanya sumber pesan, media, penerima, dan efek. Cangara tahun 1998 dalam bukunya *Pengantar Ilmu Komunikasi* mengemukakan musyawarah adalah suatu proses di mana dua orang atau lebih membentuk atau melakukan pertukaran pikiran dengan satu sama lainnya, yang pada gilirannya akan tiba pada saling pengertian yang mendalam (Cangara, 1998:19).

Berdasarkan pengertian di atas, Cangara menspesifikasikan hakikat suatu hubungan dengan adanya suatu pertukaran pikiran atau pesan, di mana ia menginginkan adanya perubahan sikap dan tingkah laku serta kebersamaan dalam menciptakan saling pengertian dari orang-orang yang ikut serta dalam suatu proses musyawarah. Musyawarah tidak akan berjalan apabila hanya dilakukan oleh satu orang, tetapi lebih efektifnya, dilakukan oleh dua orang atau lebih.

Proses musyawarah juga dilakukan oleh pemerintahan. Komunikasi pemerintahan menurut Erliana Hasan dalam bukunya *Komunikasi Antar Pemerintahan*, adalah:

> “Penyampaian ide, program, dan gagasan pemerintah kepada masyarakat dalam rangka mencapai tujuan negara. Dalam hal ini pemerintah dapat diasumsikan sebagai komunikator dan masyarakat sebagai komunikan, namun dalam suasana tertentu

This document was created using SOLID CONVERTER PDF To remove this message, purchase the product at www.SolidDocuments.com

> bisa sebaliknya masyarakat berada pada posisi sebagai penyampai ide atau gagasan dan pemerintah berada pada posisi mencermati apa yang diinginkan masyarakat" (Hasan, 2004:95).

Dalam Kondisi tersebut, berarti pemerintah memiliki kewenangan sekaligus bertanggung jawab untuk mempertimbangkan, bahkan untuk merespon keinginan-keinginan tersebut sesuai dengan aturan dan ketentuan yang berlaku. Adapun unsur-unsur dalam proses pelaksanaan musyawarah menurut Solichin Abdul Wahab dalam bukunya yang berjudul *Analisis Kebijakan Dari Formulasi ke Implementasi Kebijaksanaan Negara,* sebagai berikiut:

1. Pemecahan Masalah
   Pemikiran secara ilmiah yang dapat menemukan *solusition*.
2. Menagatasi Kendala
   Suatu kendala yang ada, tetapi bisa diatasi
3. *Noise* (ancaman)
   Anacaman tak terencana yang terjadi dalam proses perencanaan akibat adanya pesan lain yang di terima.
   (Wahab, 2001:68)

Pemecahan masalah yang menjadi pokok berlangsungnya suatu musyawarah, terutama dalam mengelola, mengendalikan jalannya musyawarah. Pemecahan masalah yang menjadi pokok berlangsungnya suatu musyawarah, terutama dalam mengelola, mengendalikan jalannya musyawarah. Untuk itu, para peserta musyawarah harus terampil berkomunikasi, dan juga mempunyai ide-ide yang menarik serta penuh daya kreativitasUntuk itu, para peserta musyawarah harus terampil berkomunikasi, dan juga mempunyai ide-ide yang menarik serta penuh daya kreativitas. Selain itu, musyawarah harus memiliki kepercayaan, daya tarik, dan kekuatan (Cangara, 1998:89).

This document was created using SOLID CONVERTER PDF To remove this message, purchase the product at www.SolidDocuments.com

Kendala terdiri dari dari berbagai aspek yang bersinggungan dengan apa yang menjadi bahasannya, suatu instansi pemerintahan memiliki kendala dalam menjalankan program pembangunan daerah yang telah di rencanakannya. Namun, perlu mensosialisasikan kembali program tersebut kepada para perencanana, karena para *stakeholder* yang ada dalam pelaksanaan Musrenbang yang lainnya masih terdapat ketidakmengertian dan perbedaan cara berepikir, Kemampuan manusia berpikir dalam mempertimbangkan apa yang menjadi kendala adalah cara berpikir yang normal. (Cangara, 1998:99).

Noise (ancaman). ancaman pelaksanaan musyawarah bisa terjadi pada semua elemen atau unsur-unsur yang mendukungnya, cara mengatasi ancaman sangatlah penting bagi para peserta di Musrenbang hal-hal yang mengganggu perencanaan pembangunan harus bisa di atasi dengan seksama. Hal tersebut, disebabkan karena menjadi pokok bahasan yang utama yaitu mengatasi ancaman yang nampak pada pembangunantermasuk faktor lingkungan dimana komunikasi itu terjadi. Gangguan terjadi apabila terdapat intervensi yang mengganggu salah satu elemen pelaksanaan musyawarah, sehingga proses pelaksanaan musyawarah ini tidak dapat berlangsung secara efektif. Kemudian ada hambatan yang membuat proses pelaksanaan musyawarah tidak dapat berlangsung sebagaimana harapan pelaksanaan musyawarah dan penerima.

This document was created using SOLID CONVERTER PDF To remove this message, purchase the product at www.SolidDocuments.com

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Purwakarta, sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang mempunyai tugas pokok dan fungsi menyelenggarakan perencanaan pembangunan di daerah, pada tahun 2010 telah menghasilkan beberapa dokumen dan pelaksanaan perencanaan pembangunan. Guna lebih menyelaraskan rencana pembangunan tahunan daerah serta dalam rangka eksplorasi aspirasi masyarakat, pada awal Januari sampai dengan Maret 2010 telah dilaksanakan Musrenbang (Musyawarah Perencanaan Pembangunan), yang meliputi kegiatan: Musrenbang Tingkat Desa dan Kelurahan, Musrenbang Tingkat Kecamatan, Forum SKPD dan Musrenbang Tingkat Kabupaten. *Output* dari pelaksanaan Musrenbang Tahun 2010 berupa Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Purwakarta Tahun 2009.

Aspek akuntabilitas pembangunan, pada tahun 2010 telah dilaksanakan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2009 dan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Purwakarta Tahun 2009. Kedua dokumen tersebut merupakan *report* pertanggungjawaban pengelolaan pembangunan serta perkembangan kinerja pembangunan selama tahun anggaran 2009.

Penyelenggaraan pembangunan pada periode jangka panjang, pada tahun 2010 berhasil dilaksanakan Musrenbang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Purwakarta

This document was created using SOLID CONVERTER PDF To remove this message, purchase the product at www.SolidDocuments.com

Tahun 2005-2025, dengan peserta seluruh stakeholder pada semua jenjang dan tingkatan pembangunan di Purwakarta. Pelaksanaan Musrenbang RPJPD menghasilkan pointer-pointer aspirasi pembangunan jangka panjang, sebagai bahan masukan dan penyempurnaan naskah Raperda RPJPD.

Aspek penganggaran dan keuangan daerah, pada tahun 2008 telah dilaksanakan penyusunan Rancangan Nota Kesepakatan tentang KUA dan PPAS Perubahan, sebagai dokumen acuan penyusunan dan pembahasan RAPBD Perubahan Tahun Anggaran 2008. Guna menjaga kesesuaian penggunaan dan alokasi anggaran pada APBD Perubahan Tahun Anggaran 2010, pada tahun 2009 telah pula dilaksanakan penelitian RASK Perubahan, dengan objek seluruh pengguna anggaran (SKPD Pemerintah Kabupaten Purwakarta).

Guna lebih mendukung pembangunan antar sektor di Kabupaten Purwakarta, Bappeda Kabupaten Purwakarta telah melaksanakan penyusunan kegiatan-kegiatan perencanaan pembangunan, yang tersebar dalam lingkup bidang pembangunan : Sosial Budaya, Fisik dan Prasarana, serta Ekonomi dan Pembiayaan. Pada bidang sosial dan budaya telah dilaksanakan Survei Sosial Ekonomi Daerah, Indeks Pembangunan Manusia, Purwakarta Dalam Angka, dan Evaluasi Pembangunan Bidang Sosial Budaya, dan Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Sosial dan Budaya. Pada bidang ekonomi dan pembiayaan telah dilaksanakan kegiatan RIA *(Regulatory Impact*

This document was created using SOLID CONVERTER PDF To remove this message, purchase the product at www.SolidDocuments.com

Assesment), Penyusunan PDRB, Monitoring dan Evaluasi Bidang Ekonomi dan Pembiayaan, serta Rapat Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi dan Pembiayaan. Sedangkan pada Bidang Fisik dan Prasarana, pada tahun 2009 telah melaksanakan kegiatan evaluasi pembangunan bidang fisik dan prasarana, sosialisasi Rancangan RTRW, kejian tentang kawasan agropolitan, penyusunan peta dasar citra satelit, serta rakor perencanaan pembangunan bidang prasarana wilayah. (Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Purwakarta Tahun 2010).

Pelaksanaan Musrenbang dalam Bidang Sosial dan Budaya di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2010 dilaksanakan dalam rangka melaksanakan amanat Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004, tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN, serta Surat Edaran Bersama Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala BAPPENAS dan Menteri Dalam Negeri Nomor 0008/M.PPN/01/ 2007-050/264.A/SJ, tanggal 16 Januari 2008 perihal Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Musrenbang Tahun 2008 serta Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2009 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Purwakarta. Peraturan tersebut mengamanatkan bahwa perencanaan pembangunan daerah dilakukan berdasarkan peran dan kewenangan masing-masing guna mewujudkan integrasi, sinkronisasi dan sinergitas pembangunan, antar

This document was created using SOLID CONVERTER PDF To remove this message, purchase the product at www.SolidDocuments.com

pemangku kepentingan pembangunan, antar daerah, antar ruang, antar waktu, antar fungsi pemerintahan dan antar susunan pemerintahan.

Berdasarkan Kerangka Pemikiran di atas, maka definisi operasional dalam Kuliah Kerja Lapangan ini adalah:

1. Pelaksanaan Musrenbang adalah memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan yang didasarkan pada kondisi, potensi, permasalahan, kebutuhan nyata, dan aspirasi masyarakat yang tumbuh berkembang di Kabupaten Purwakarta.

   Adapun yang menjadi indikatornya dalah :

   a) Memilih materi yang menjadi masalah pada perencanaan pembangunan, dengan mengumpulkan informasi untuk memecahkan masalah dan menciptakan terobosan-terobosan baru (*breaktrought*) dalam perencanaan pembangunan ke depan.

   b) Pembentukan kelompok (*jigsaw learning*). Untuk mengatasi kendala pembangunan dan membuat rancangan kerja sesuai dengan anggaran yang berhubungan dengan pembangunan

   c) Menutup semua ancaman untuk melaksanakan program kerja yang tertuang dalam kesimpulan topik pembahasan Musrenbang serta mendapatkan perencanaan pembangunan yang berkualitas.

This document was created using SOLID CONVERTER PDF To remove this message, purchase the product at www.SolidDocuments.com

2. Bidang Sosial dan Budaya Badan Perencanaan Pembangunan Kabupaten Purwakarta mempunyai peranan penting dalam pelaksanakan Musrenbang yaitu :

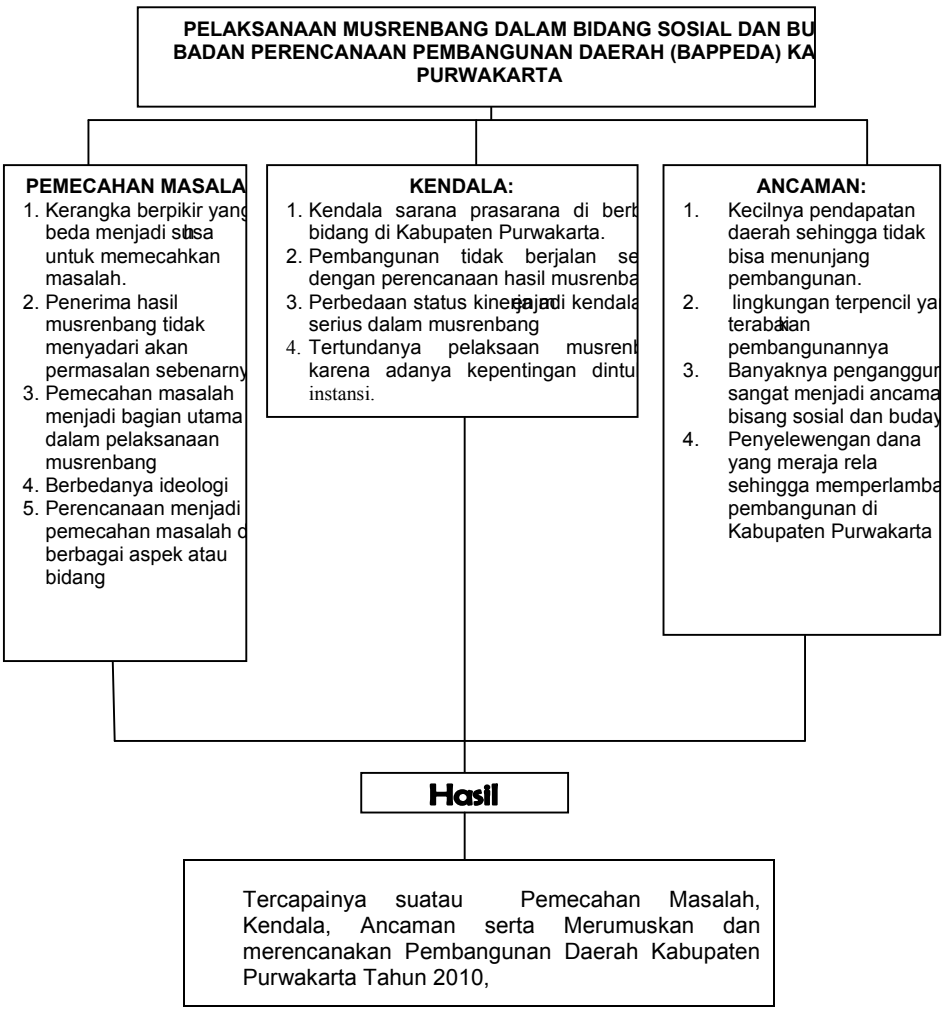
a) Penyusunan bahan perumusan kebijakan teknis perencanaan pembangunan lingkup sumber daya pemerintahan dan aparatur serta sosial budaya.

b) Penyusunan petunjuk teknis lingkup perencanaan pembangunan sumber daya pemerintahan dan aparatur serta sosial budaya.

c) Pembinaan dan pelaksanaan pengkoordinasian penyusunan perencanaan pembangunan lingkup sumber daya pemerintahan dan aparatur serta sosial dan budaya.

This document was created using SOLID CONVERTER PDF To remove this message, purchase the product at www.SolidDocuments.com

Gambar 1.1
Model Kerangka Pemikiran Laporan Kuliah Kerja Lapangan



This document was created using SOLID CONVERTER PDF
To remove this message, purchase the product at www.SolidDocuments.com

1.6 Metode Laporan Kuliah Kerja Lapangan

1.6.1 Metode Laporan Kuliah Kerja Lapangan

Metode Laporan Kuliah Kerja Lapangan yang digunakan dalam Kuliah Kerja Lapangan ini adalah metode penelitian deskriptif. Pengertian penelitian deskriptif adalah:

> "Penelitian yang dimaksudkan untuk menuturkan dan menafsirkan data yang berkenaan dengan situasi yang terjadi dan dialami sekarang, hubungan antar variabel, pertentangan dua kondisi atau lebih, pengaruh terhadap suatu kondisi, perbedaan-perbedaan antarfakta, dan lain-lain" (Subana, 2001:26).

Metode penelitian deskriptif bertujuan untuk memberikan gambaran tentang suatu masyarakat atau suatu kelompok orang tertentu atau gambaran tentang suatu gejala atau hubungan antara dua gejala atau lebih. Menurut Sanapiah Faisal dalam bukunya *Format-Format Penelitian Sosial,* menjelaskan bahwa penelitian deskriptif (*descriptive research*) adalah:

> "Untuk eksplorasi dan klarifikasi mengenai suatu fenomena atau kenyataan sosial dengan jalan mendeskripsikan sejumlah variabel yang berkenaan dengan masalah dan unit yang diteliti. Jenis penelitian ini tidak menggunakan dan tidak melakukan pengujian hipotesis, berarti tidak dimaksudkan untuk membangun dan mengembangkan perbendaharaan teori" (Faisal, 1999:20).

Penulis menggunakan metode deskriptif, karena penelitian ini dimaksudkan untuk memberi gambaran tentang pelaksanaan musrenbang dalam Bidang Sosial dan Budaya di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Purwakarta, serta mendeskripsikan sejumlah konsep yang berkenaan dengan masalah pelaksanaan musrenbang dalam Bidang Sosial dan Budaya di Badan Perencanaan

This document was created using SOLID CONVERTER PDF To remove this message, purchase the product at www.SolidDocuments.com

Pembangunan Daerah (BAPPEDA) tersebut. Berdasarkan metode tersebut, penulis menggunakan pendekatan kualitatif, yaitu:

> "Pendekatan yang berupa deskripsi dari gejala-gejala yang diamati, tidak berbentuk angka-angka atau koefisien antarvariabel. Data yang dianalisis tidak untuk menerima atau menolak hipotesis, cenderung digunakan untuk gejala yang berhubungan dengan perilaku sosial/manusia dengan berbagai argumentasi" (Subana, 2001:17).

Penulis menggunakan pendekatan kualitatif karena penulis mendeskripsikan teori-teori yang telah diperoleh selama perkuliahan dan dari hasil penelitian di lapangan dengan fakta-fakta yang ada yang berhubungan dengan pelaksanaan Musrenbang dalam Bidang Sosial dan Budaya di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA).

1.6.2 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam Laporan Kuliah Kerja Lapangan ini melalui:

1. Studi Pustaka, yaitu dengan membaca dan mencari buku-buku, dan surat kabar yang berhubungan dengan pelaksanaan musrenbang dalam Bidang Sosial dan Budaya di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) di Kabupaten Purwakarta serta dokumenter, yaitu cara pencatatan dokumen, dan sumber datanya berupa catatan, dokumen atau pun modul yang tersedia.
2. Studi Lapangan, yaitu dengan mengamati dan terjun langsung ke lapangan untuk mengetahui tentang pelaksanaan musrenbang dalam

This document was created using SOLID CONVERTER PDF To remove this message, purchase the product at www.SolidDocuments.com

Bidang Sosial dan Budaya di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA). Studi lapangan ini terdiri dari:

a. Observasi non partisipan, yaitu teknik pengumpulan data dengan cara peneliti berada di luar subjek yang diteliti dan tidak ikut dalam kegiatan-kegiatan yang mereka lakukan, sehingga peneliti dapat lebih mudah mengamati tentang data dan informasi yang diharapkan.
b. Wawancara, melakukan tanya jawab dengan nara sumber yang mengetahui dan memahami lebih jauh khususnya mengenai pelaksanaan musrenbang dalam Bidang Sosial dan Budaya di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA).

1.6.3 Teknik Penentuan Informan

Teknik penentuan informan yang digunakan dalam Laporan Kuliah Kerja Lapangan ini adalah *purposive* (pengambilan informan berdasarkan tujuan). Teknik penentuan informan ini adalah siapa yang akan diambil sebagai anggota informan diserahkan pada pertimbangan pengumpul data yang sesuai dengan maksud dan tujuan Laporan Kuliah Kerja Lapangan. Menurut Sanapiah Faisal, teknik *purposive* adalah:

"Teknik pengambilan sampel yang didasarkan atas kriteria atau pertimbangan tertentu; jadi tidak melalui proses pemilihan sebagaimana yang dilakukan dalam teknik random. Sampel ditetapkan secara sengaja oleh peneliti" (Faisal, 1999:67).

This document was created using SOLID CONVERTER PDF To remove this message, purchase the product at www.SolidDocuments.com

Penentuan informan dalam Laporan Kuliah Kerja Lapangan ini berdasarkan objek yang diteliti dan berdasarkan keterkaitan informan tersebut dengan penelitian. Informan dalam penelitian ini terdiri dari informan yang berkaitan dengan komunikasi pemerintahan yaitu berasal dari pejabat maupun pegawai Pemerintah Daerah Kabupaten Purwakarta karena penulis ingin mengetahui pelaksanaan pemecahan masalah pada musrenbang dalam Bidang Sosial dan Budaya di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Purwakarta dan proses mengatasi kendala pembangunan yang menimbulkan ancaman tertentu.

Adapun informan yang berkaitan dengan Musrenbang Badan Perencanaan Pembangunan Kabupaten Purwakarta yaitu:

1. Kepala Bappeda yang mengetahui segala aspek perencanaan pembanunan yang di hasilkan dari pelaksanaan Musrenbang.
2. Kasubag Bidang Sosial dan Budaya Bappeda, mengetahui tentang perencanaan pembangunan Bidang Sosial dan Budaya Kabupaten Purwakarta.
3. Pegawai Litbang, penulis ingin mengetahui keefektifan pembangunan dan lingkungan pemerintah Kabupaten Purwakarta.
4. Staf bagian fisik Bappeda yang mempunyai informasi tentang kelebihan dan kekurangan pembangunan di Kabupaten Purwakarta.

This document was created using SOLID CONVERTER PDF To remove this message, purchase the product at www.SolidDocuments.com

1.6.4 Analisa Data

Teknik analisa data yang sesuai dengan penelitian ini adalah analisis deskriptif kualitatif. Secara operasional teknis analis data yang dilakukan melalui beberapa tahapan sebagaimana model teknik analisis data yang dikemukakan Miles dan Huberman dalam Sugiyanto yang berjudul *Memahami Penelitian Kualitatif adalah:*

Pertama, reduksi data sebagai proses pemilihan, penyederhanaan klasifikasi data kasar dari hasil penggunaan teknik dan alat pengumpulan data di lapangan, reduksi data sesudah dilakukan semenjak pengumpulan data. Reduksi dilaksanakan secara bertahap dengan cara membuat ringkasan data dan menelusuri tema yang tersebar. Setiap data yang dipilih disilang melalui komentar dari informasi yang berbeda untuk menggali informasi dalam wawancara dan observasi. Informasi yang berasal dari masyarakat yang menjadi narasumber.

Kedua, penyajian data merupakan upaya penyusunan sekumpulan informasi menjadi pernyataan. Data kualitatif disajikan dalam bentuk teks yang pada mulanya terpencar dan terpisah menurut sumber informasi dan pada saat diperolehnya informasi tersebut. Kemudian data diklasifikasikan menurut pokok-pokok permasalahan yang antara lain terkait dengan pelaksanaan musrenbang dalam Bidang Sosial dan Budaya di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA).

Ketiga, menarik kesimpulan berdasarkan reduksi, interpelasi, dan penyajian data yang telah dilakukan pada setiap tahap sebelumnya

This document was created using SOLID CONVERTER PDF To remove this message, purchase the product at www.SolidDocuments.com

selaras dengan mekanisme logika pemikiran induktif, maka penarikan kesimpulan akan bertolak dengan hal-hal yang khusus (*spesific*) sampai dengan rumusan kesimpulan sifatnya umum (*general*).

Pengertian analisis data tersebut menurut Husaini Usman dan Purnomo Setiady Akbar dalam bukunya yang berjudul *Metode Penelitian Sosial* adalah satu data yang harus dianalisis setelah dikumpulkan dan dituangkan dalam bentuk laporan lapangan. Data yang di analisis oleh Penulis adalah data kualitatif (Sugiyanto, 1992:15-20).

1.7 Lokasi dan Jadwal Laporan Kuliah Kerja Lapangan

Lokasi Kuliah Kerja Lapangan di Kantor Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) yang beralamat di Jl. Gandanagara No. 9 Purwakarta. Adapun pelaksanaan Kuliah Kerja Lapangan di mulai pada tanggal 1 Agustus 2010 s.d 30 Agustus 2010 dan Waktu kerjanya mulai pukul 07.30 s.d 16.00 WIB.

Untuk lebih jelas dapat dilihat dari tabel di bawah ini :

This document was created using SOLID CONVERTER PDF To remove this message, purchase the product at www.SolidDocuments.com

Tabel 1.1
Jadwal Kegiatan Waktu Kuliah Kerja Lapangan

No	Kegiatan	Tahun 2010					
		Juni	Juli	Agust	Sept	Okt	Nov
1	Mengajukan surat ke Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kab. Purwakarta						
2	Pelaksanaan Kuliah Kerja Lapangan						
3	Pengumpulan data						
4	Analisis Data						
5	Penulisan Laporan Kuliah Kerja Lapangan						
6	Pengumpulan Laporan Laporan Kuliah Kerja Lapangan						

This document was created using SOLID CONVERTER PDF To remove this message, purchase the product at www.SolidDocuments.com